KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR: 40/KPN.W3-U7/SK.KP1.2/I/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Menimbang :

a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

b. Bahwa setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik,termasuk pengadilan;

c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 166/KPN.W3-U7/SK.KP1.2/IX/2023, tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Daftar Infromasi Layanan Informasi Publik Pada Pengadilan Negeri Solok Tahun 2023.

KEDUA Menetapkan Daftar Informasi Layanan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Penetapan ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

RADIUS CHANDRA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok;
2. Arsip;

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 40/KPN.W3-U7/SK.HK1.2.5/I/2024 tentang Daftar Layanan Informasi Pengadilan Negeri Solok.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PENGADILAN NEGERI SOLOK

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan Negeri Solok

A.1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Negeri Solok

1. Profil Pengadilan, meliputi:
   a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
   b. Struktur organisasi Pengadilan;
   c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
   d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
   e. Profil singkat pejabat struktural; dan
   f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Negeri Solok yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
3. Biaya berperkara di Pengadilan Negeri Solok.
4. Agenda sidang.

A.2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas:
   a. Nama program dan kegiatan;
   b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
   c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
   d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
   e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya.
2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
   b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris (laporan BMN).
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

A.4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
d. Alasan penolakan permohonan informasi.

B. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

Pengadilan Negeri Solok mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

B.1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

B.2. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan

1. Surat Keputusan dan instruksi yang diterbikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok;

B.3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
2. Profil Hakim dan Pegawai.
3. Data statistik kepegawaian.
4. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
5. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

C. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
   a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;

b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
   a. Informasi dalam proses musyawarah hakim;
   b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
   c. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
   d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
   e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
   f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
   g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Ditetapkan di Solok
Pada 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

RADIUS CHANDRA

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 40/KPN.W3-U7/SK.HK1.2.5/I/2024 tentang Daftar Layanan Informasi Pengadilan Negeri Solok.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Periode 2024

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
1.	Profil Pengadilan Negeri Solok Kelas II	PPID Pelaksana (PTIP)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun, tempat pembuatan di PN Solok	Tertulis di website PN Solok	Jan s.d Des	-
2.	Prosedur beracara untuksetiap jenis perkara yang menjadikewenangan Pengadilan	PPID Pelaksana (Perdata dan Pidana)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun, tempat pembuatan di Kepaniteraan Perdata, Pidana PNSolok	1. Tertulis di website PN Solok 2. Secaralisan di PTSP BagianPerdata dan Pidana.	Jan s.d Des	-
3.	Biaya berperkaradi Pengadilan Negeri Solok	PPID Pelaksana (Perdata)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun, atau sesuai dengan SK KPN, tempat pembuatan diPN Solok	Dalam bentuk SK KPN dan diupload di website PN Solok	Jan s.d Des	-
4.	Agenda sidang	PPID Pelaksana (Perdata dan Pidana)	PPID	Pembaharuan setiap hari, tempat pembuatan di Kepaniteraan Perdata, Pidana PN Solok	Elektronik di SIPP	Jan s.d Des	-
5.	Bantuan Hukum, Prodeo, Hak-hak Pokok dalam Proses Persidangan	PPID Pelaksana (Perdata, Pidana dan Hukum)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun, tempat pembuatan di Kepaniteraan Perdata, dan Hukum PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok, banner 2. Secara lisan di PTSP Bagian Perdata dan Hukum	Jan s.d Des	-

6.	Tata carapengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim danPegawai serta Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.	PPID Pelaksana (Hukum)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun, tempat pembuatan di Kepaniteraan Hukum PN Solok	1. Tertulis di website PN Solok, banner 2. Secara lisan di PTSP Bagian Hukum	Jan s.d Des	-
7.	Tatacaramemperoleh pelayanan Informasi, tatacaramengajukankeberatan terhadap pelayanan Informasi sertanama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasidanpenanganan keberatan terhadap pelayanan informasi serta Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.	PPID Pelaksana (Hukum)	Atasan PPID, PPID	Pembaharuan/reviu sesuai SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. Secara lisan di PTSP Bagian Hukum	Jan s.d Des	-
8.	Biaya untuk Memperoleh salinan informasi.	PPID Pelaksana (Hukum)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun, tempat pembuatan di Kepaniteraan Hukum PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. Secara lisan di PTSP Bagian Hukum	Jan s.d Des	-
9.	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan di Pengadilan	PPID Pelaksana (Umum Keuangan dan PTIP)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun, tempat pembuatan di Kesekretariatan PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Informasi	Jan s.d Des	-
10.	Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP)	PPID Pelaksana (PTIP)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap akhir tahun, tempat pembuatan di Kesekretariatan dan PTIP PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Informasi	Jan s.d Des	-

11.	Laporan Keuangan	PPID Pelaksana(Umum Keuangan dan PTIP)	PPID	Pembuatansetiap bulandanakhirtahun, tempat pembuatandi Kesekretariatan,Umum dan Keuangan sertaPTIPPNSolok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Informasi	Jan s.d Des	-
12.	Daftar Aset dan PPID Pelaksana Inventaris (Umum dan	PPID Pelaksana(Umum Keuanga dan PTIP)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun, tempat pembuatan di Kesekretariatan dan Umum Keuangan PNSolok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSPMeja Informasi	Jan s.d Des	
13.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	PPID Pelaksana(Umum Keuangan dan PTIP)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap akan ada pengadaan barang/jasa tahun, tempat pembuatan di Kesekretariatan, Umum dan Keuangan serta PTIP PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSPMeja Informasi	Jan s.d Des	
14.	Informasi Laporan Akses Informasi (Hukum) a. Jumlah permohonan informasiyang diterima; b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan d. Alasan penolakan permohonan informasi yang diperlukan dalam memen	PPID Pelaksana (Hukum)	Atasan PPID, PPID	Pembaharuan reviu sesuai SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Informasi	Jan s.d Des	
15.	Seluruh putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan	PPID Pelaksana (Perdata dan Pidana)	PPID	Pembuatan kalau ada permintaan	Fotokopi atau Salinan elektronik (Bukan Salinan	Jan s.d Des	

	hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi ataunaskah elektronik, bukan salinan resmi).				Resmi)		
16.	Informasi dalam Buku Register Perkara	PPID Pelaksana (Perdata dan Pidana)	PPID	Setiap hari	Elektronik- SIPP di website PN Malang	Jan s.d Des	
17.	Data statistik perkara	PPID Pelaksana (Hukum)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap bulan, tempat pembuatan di Kepaniteraan HukumPN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Hukum	Jan s.d Des	
18.	Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara	PPID Pelaksana (Perdata dan Pidana)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap hari, tempat pembuatan di Kepaniteraan Perdata PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Perdata	Jan s.d Des	
19.	Laporan penggunaan biaya perkara	PPID Pelaksana (Perdata)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap bulan, tempat pembuatan di Kepaniteraan Perdata PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Perdata	Jan s.d Des	
20.	Surat Keputusan dan intruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok	PPID Pelaksana (Ortala Personalia dan PTIP)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap ada SK dan intruksi yang baru dari KPN, tempat pembuatan di Personalia dan PTIP PN Solok	1. Tertulis di JDIH PN Solok 2. PTSP Meja Informasi	Jan s.d Des	
21.	Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan	PPID Pelaksana (Perdata, Pidana, Hukum, Umum, Informasi dan Pengaduan)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun, tempat pembuatan di PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Informasi	Jan s.d Des	
22.	Profil Hakim dan Pegawai	PPID Pelaksana (Ortala dan	PPID	Pembaharuan/reviu setiap ada Hakim dan pegawai	1. Tertulis diwebsite PN Solok	Jan s.d Des	

		Kepegawaian)		baru/ mutasi, tempat pembuatan di Ortala dan Kepegawaian PN Solok	2. PTSP Meja Informasi		
23.	Data statistik kepegawaian	PPID Pelaksana (Ortala dan Kepegawaian)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap ada Hakim dan pegawai baru/ mutasi, tempat pembuatan di Ortala dan Kepegawaian PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Informasi	Jan s.d Des	
24.	Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya	PPID Pelaksana (Umum Keuangan dan PTIP)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap ada Hakim dan pegawai baru/ mutasi, tempat pembuatan di Ortala dan Kepegawaian PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Informasi	Jan s.d Des	
25.	Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga	PPID Pelaksana (Perdata, Pidana, Hukum, PTIP, Umum Keuangan, Ortala Kepegawaian)	PPID	Pembaharuan/reviu setiap tahun insidentil, tempat pembuatan di Ortala dan Kepegawaian PN Solok	1. Tertulis diwebsite PN Solok 2. PTSP Meja Informasi	Jan s.d Des	

Ditetapkan di Solok
Pada 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

RADIUS CHANDRA